

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sebagai hasil modernisasi mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Modernisasi diartikan sebagai transformasi individu dari gaya hidup tradisional ke cara hidup yang lebih kompleks, teknologis, dan dinamis. Proses ini diawali dengan kesuksesan pemulihan Eropa pasca perang melalui proyek Marshal Plan, menjadikan pembangunan sebagai metode yang wajib diadopsi oleh negara-negara pasca kolonial, bahkan menjadi tren global. Perdebatan muncul ketika proyek pembangunan berjalan beberapa dekade dengan banyak ketidaksesuaian dan ketimpangan pelaksanaan. Masalah seperti kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan, dan kekerasan tetap menjadi tantangan bagi negara-negara terbelakang dan berkembang.

Kritik terhadap konsep dan pelaksanaan proyek pembangunan muncul sebagai respons terhadap ketidaksesuaian tersebut. Pembangunan sering diidentifikasi dengan pertumbuhan ekonomi, diukur dengan produktivitas masyarakat atau negara melalui Gross National Product (GNP) dan Gross Domestic Product (GDP). Namun, menurut Dr. Arief Budiman (1996), tingginya produktivitas dan meratanya pendapatan penduduk tidak selalu menjamin kemakmuran, karena pembangunan berfokus pada produktivitas dan bergantung kepada sumber daya alam sering mengabaikan dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup seperti pengurasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup.¹ Salah satu permasalahan krusial dalam proses pembangunan ekonomi adalah menemukan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.² Pembangunan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan hidup pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap

¹ Budiman, Arief, 1996, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta.

² Fauzi, Akhmad, 2004, Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

lingkungan itu sendiri. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki batasan dalam kapasitas dukungan yang tersedia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang tidak mempertimbangkan batasan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan di masa yang akan datang.

Dua ide pokok dalam pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan dan keterbatasan. Gagasan kebutuhan sebagai kebutuhan esensial untuk keberlanjutan manusia. Gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Perubahan budaya dan gaya hidup menjadi esensial untuk kebiasaan konsumsi berlebihan melampaui kebutuhan yang timbul akibat industrialisasi. Maka konsep keberlanjutan dalam pembangunan bertujuan agar pembangunan dapat terus berlangsung, mencegah kehancuran lingkungan hidup dan memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi generasi berikutnya.

Dalam konteks tersebut maka pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan telah banyak dikritik dan hingga saat ini menjadi masalah yang terus dibahas oleh forum internasional. Dengan adanya konferensi ekonomi bukan hanya masalah lingkungan yang menjadi kepedulian keilmuan, bukan juga hanya masalah sosial yang menjadi kepedulian negara, namun menjadi hubungan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial dan menjadi kepedulian seluruh umat manusia untuk terlibat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Komitmen negara sangat diperlukan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam model yang ideal membutuhkan persamaan generasi, keadilan, partisipasi, dan persamaan gender, tentu hal ini harus dimulai dari keinginan pemerintah. *World Summit on Sustainable Development 2002* merupakan pertemuan yang menghasilkan Political Declaration dan Johannesburg Plan of Implementation (JPOI). Deklarasi tersebut terdiri dari enam bagian yang intinya merupakan komitmen untuk melaksanakan JPOI dengan penetapan kerangka waktu untuk mewujudkan capaian-capaian. Pertemuan ini dianggap gagal karena tidak menghasilkan perjanjian apapun, namun telah berhasil menciptakan hampir 300 kerjasama antar negara dan sektor non negara untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan. Inisiatif dan kerjasama ini tentu saja akan meningkatkan komitmen negara untuk terlibat dalam usaha bersama ini.

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan model utama yang ditawarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kegagalan model pembangunan yang timpang sampai akhir milenium ini. Tujuan Pembangunan Milenium, menawarkan suatu paradigma baru bagi teori dan praktik pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. Pada bulan September tahun 2000, perwakilan dari 189 negara menandatangani deklarasi yang dikenal sebagai Millennium Declaration, yang mengandung 8 poin yang harus dicapai sebelum tahun 2015. Kesepakatan tersebut melibatkan tidak hanya negara-negara maju, tetapi juga negara-negara miskin dan berkembang.³ Hal ini membawa konsekuensi bagi perlunya langkah tindak lanjut dari agenda pembangunan milenium, sehingga adanya SDGs merupakan lanjutan dari MDGs.

SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 bertempat di Kantor Pusat PBB New York oleh 193 negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mempunyai 17 Tujuan atau Goals yang dapat diukur sehingga mempermudah implementasinya. Dalam konteks pembangunan berdasarkan SDGs terdapat 241 indikator sebagai tolak ukur untuk melihat keterkaitan antar ke-17 tujuan serta 167 target yang ditentukan. Alam dan seluruh ekosistemnya juga termasuk hal yang diperhatikan oleh SDGs, untuk menjamin kehidupan yang berkelanjutan.⁴

Komitmen pembangunan yang dilaksanakan oleh SDGs tidak hanya terfokus pada kemajuan manusia, tetapi juga memperhatikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sehingga SDGs mempunyai target lebih beragam dan rinci, untuk ditujukan kepada seluruh populasi dari berbagai kelompok usia dan latar belakang, dengan menekankan prinsip

³ MDG Monitor, Category: Millennium Development Goals, <https://www.mdgmonitor.org/millennium-development-goals/>

⁴ SDGs Interlinks, SDG Interlinkages Analysis & Visualisation Tool (V4.0), <https://sdginterlinkages.iges.jp/>

kesetaraan dan penolakan terhadap diskriminasi.⁵ SDGs menekankan peran sentral manusia sebagai pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia atau *human well-being*. Keberhasilan pembangunan dalam mencapai kesejahteraan yang diinginkan oleh manusia bergantung pada perilaku manusia terhadap alam dan cara mereka memanfaatkannya untuk kepentingan kesejahteraan saat ini dan bagi generasi yang akan datang.⁶

Salah satu agenda SDGs dibuat untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di saat ini dan di masa yang akan datang. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi sejak revolusi industri menimbulkan efek rumah kaca akibat pelepasan gas ke atmosfer bumi sehingga perubahan iklim semakin parah. Perubahan iklim merupakan tantangan global yang semakin mendesak dan memberikan dampak buruk yang signifikan di seluruh dunia. Saat ini terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, peningkatan suhu rata-rata global, naiknya permukaan air laut. Peningkatan emisi gas dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri, menjadi penyebab utama perubahan iklim yang memberikan dampak serius terhadap lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan manusia.

Peningkatan suhu global juga berkontribusi pada mencairnya es di Kutub Utara dan Selatan, mengakibatkan kenaikan permukaan air laut dan ancaman bagi pulau-pulau kecil serta wilayah pesisir. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga merupakan isu kesejahteraan umum yang memerlukan kerjasama global untuk mengurangi emisi, meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, dan menjaga keberlanjutan planet ini bagi generasi mendatang.

Perubahan iklim mempunyai peranan signifikan dalam kemajuan ekonomi secara global, dalam hal ini perubahan iklim yang ekstrim mempunyai efek yang

⁵Smeru.or.id, Dari MDGs ke SDGs: Memetik Pelajaran dan Menyiapkan Langkah Konkret <https://smeru.or.id/id/publication-id/dari-mdgs-ke-sdgs-memetik-pelajaran-dan-menyiapkan-langkah-konkret>

⁶ SDGs Bappenas, Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, <https://sdgs.bappenas.go.id/dokumen-hasil-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>

signifikan terhadap global. Selain peningkatan bencana alam, konsekuensi merugikan yang lain adalah penurunan hasil produksi pertanian dan industri. Hal ini menciptakan tekanan yang signifikan pada infrastruktur, sumber daya energi, dan jalur pasokan global, yang mengakibatkan tingkat ketidakpastian yang merugikan bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya, usaha-usaha untuk meredam dan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim membuka pintu bagi kemungkinan inovasi teknologi, investasi pada sumber energi terbarukan, serta pengembangan sektor baru dalam ekonomi berkelanjutan yang menawarkan potensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling terkena dampak negatif perubahan iklim, terutama dampak jangka panjang yaitu peningkatan suhu rata-rata serta peningkatan keparahan dan frekuensi banjir, kekeringan dan badai. Kejadian tersebut mempunyai dampak buruk terhadap sektor ekonomi utama, yaitu pertanian, pariwisata, dan industri. Aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi berkontribusi terhadap efek rumah kaca di Thailand. Walaupun secara global Thailand hanya menyumbang kurang dari satu persen global emisi gas, tetapi Thailand ikut menerapkan masyarakat rendah karbon dengan mengubah kebijakannya menuju energi hijau selama dekade terakhir. Pemanfaatan energi terbarukan telah diperluas secara signifikan untuk mencapai pertumbuhan hijau yang berkelanjutan.⁷

Peningkatan kesadaran terhadap lingkungan menyebabkan banyak negara membangun sistem produksi dan konsumsi yang seimbang antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong pemerintah Thailand pada 13 Januari 2021 mengumumkan kebijakan perekonomian BCG (*Bio-Circular-Green*) sebagai komponen agenda nasional untuk pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan. Pemerintah Thailand sepakat untuk menempatkan BCG dalam agenda nasional sebagai bagian dari pembangunan global untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga meningkatkan

⁷ UNFCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) [2021] “Mid-century, Long-term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy Thailand” https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Thailand_LTS1.pdf

nilai produk pertanian.⁸ Model ekonomi BCG menjadi dasar untuk membangun kekuatan ekonomi dalam keanekaragaman hayati, budaya, pertanian, layanan medis, dan pariwisata, serta dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan negara. Strategi BCG terdiri dari 3 komponen utama: (1) Bioekonomi yang ber-fokus pada pemanfaatan sumber daya biologis melalui teknologi seperti produksi bioplastik dan bioenergi. (2) Ekonomi sirkular yang ber-fokus pada pencarian sumber daya alam yang paling efektif untuk meminimalkan limbah melalui tindakan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. (3) Ekonomi hijau yang fokus pada kebijakan pengembangan ekonomi yang mempertimbangkan kerentanan lingkungan hidup.⁹ Model BCG yang didasari pada landasan teknologi, inovasi dan peningkatan ekonomi tetapi secara bersamaan tetap melindungi lingkungan. Proyek ini menjadi platform yang akan menghubungkan perusahaan kecil, besar, lembaga pemerintahan, dan mendorong semua partisipasisektor untuk bertukar informasi dan mengeksplorasi peluang dalam pengembangan bisnis serta teknologi terkait dengan BCG untuk mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Thailand sebagai negara memiliki kepentingan nasional dalam menghadapi perubahan iklim melalui pendekatan *Bio-Circular Green Economy* (BCG), dan peran negara sebagai aktor dalam hubungan internasional turut memunculkan organisasi internasional yang mendukung upaya penanganan perubahan iklim. Keberadaan organisasi internasional dalam dinamika hubungan internasional menjadi fokus utama dalam penelitian hubungan internasional dan merupakan salah satu elemen yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Pada awalnya, pendirian organisasi internasional dimaksudkan untuk menjaga agar aturan yang ada dapat berjalan efektif, sebagai langkah untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Selain itu, organisasi internasional juga dianggap sebagai forum untuk

⁸ Bangkok Post, 2021, *Government looks to BCG initiatives to drive growth*, diakses pada 20 Juli 2023 melalui: <https://www.bangkokpost.com/business/2050623/government-looks-to-bcg-initiatives-to-drive-growth>

⁹ APEC. (2022). *APEC Bio-Circular-Green (BCG) Symposium Summary Report*. [https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2022/8/apec-bio-circular-green-\(bcg\)-symposium---summary-report/222_cti_apec-bio-circular-green-symposium---summary-report.pdf?sfvrsn=e676c392_2](https://www.apec.org/docs/default-source/publications/2022/8/apec-bio-circular-green-(bcg)-symposium---summary-report/222_cti_apec-bio-circular-green-symposium---summary-report.pdf?sfvrsn=e676c392_2)

mempererat hubungan antara bangsa dan negara, walaupun tetap mengutamakan kepentingan nasional masing-masing negara dalam konteks hubungan internasional.¹⁰ APEC merupakan salah satu forum regional terkemuka di wilayah Asia-Pasifik. Sebagai salah satu pendiri dan anggota aktif APEC, Thailand telah membentuk dasar yang solid untuk kerjasama ekonomi yang erat, baik secara bilateral maupun regional. Ini menjadi penting untuk keberlanjutan, mengingat Thailand merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di ASEAN. Keanggotaan aktif Thailand di APEC memberikan keuntungan karena forum ini berusaha untuk mempermudah pergerakan barang, jasa, investasi, dan orang melintasi batas negara. Langkah kunci APEC dalam menyelaraskan sistem regulasi dianggap sebagai upaya penting untuk mengintegrasikan ekonomi di wilayah Asia-Pasifik. Pada tahun 2022 saat keketuaan APEC Thailand akhirnya berhasil mencapai konsensus untuk 3 (tiga) *outcome document*, yaitu *Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy*, *APEC Ministerial Joint Statement* dan *APEC Leaders' Declaration*.

Sebagai fokus dalam pembahasan, *Bangkok Goals for BCG Economy* mengandung komitmen-komitmen APEC dalam memperkuat kerjasama ekonomi yang dapat memberikan dampak positif pada isu lingkungan dan proyek-proyek hijau. Thailand menyatakan bahwa dokumen tersebut dapat menjadi panduan untuk memandu upaya keberlanjutan APEC ke depan, termasuk dalam bidang mitigasi perubahan iklim, perdagangan dan investasi berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta pengelolaan limbah, semua ini ditujukan untuk keberlanjutan bagi generasi mendatang. Beberapa regulasi BCG sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang berlaku secara universal, dengan mengedepankan pembentukan masyarakat yang damai dan inklusif, menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan menghadapi tantangan lingkungan saat ini, terutama perubahan iklim.

Walaupun kesadaran akan pentingnya merancang dan melaksanakan kebijakan green economy telah diterima secara global, beberapa negara masih belum mengintegrasikannya ke dalam strategi kebijakan nasional mereka.

¹⁰ A.A, Perwita., & Y. M., Yani., 2017. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 28 39 Ibid. Hal. 29

Pengembangan strategi untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) telah menjadi topik dalam perjanjian internasional. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membangun suatu sistem yang ramah lingkungan dan sekaligus mengatasi krisis keuangan global yang sedang berlangsung dengan lebih efektif. APEC Thailand memiliki alasan yang kuat untuk mengadopsi dan menerapkan model *Bio-Circular Green Economy (BCG)* sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mendukung agenda regional dan global terkait isu-isu lingkungan dan ekonomi. Beberapa alasan yang mendasari keputusan tersebut antara lain:

1. **Keberlanjutan Lingkungan:** Pemanasan global, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk wilayah Asia-Pasifik. Dengan menerapkan BCG, Thailand dapat mengurangi jejak ekologis dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lestari.
2. **Diversifikasi Ekonomi:** Bergantungnya perekonomian Thailand pada industri tertentu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. BCG dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru berbasis lingkungan, seperti energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, dan industri hijau lainnya.
3. **Peningkatan Inovasi dan Teknologi:** Implementasi BCG memerlukan pengembangan teknologi dan inovasi baru yang ramah lingkungan. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor teknologi dan peningkatan daya saing Thailand di pasar global.
4. **Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi:** Setelah pandemi COVID-19, banyak negara termasuk Thailand berfokus pada pemulihan ekonomi. BCG dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
5. **Kepatuhan Terhadap Komitmen Internasional:** Sebagai anggota APEC dan negara peserta Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan,

Thailand memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menerapkan BCG adalah langkah nyata dalam memenuhi komitmen internasional dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

6. Manfaat Jangka Panjang: Model BCG dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan mengurangi polusi, mendaur ulang bahan, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, Thailand dapat meningkatkan kualitas hidup warganya dan melindungi lingkungan alam.
7. Peluang Ekspor dan Investasi: Penerapan BCG dapat memberikan peluang baru dalam ekspor dan investasi, karena pasar global semakin menghargai produk dan layanan yang berkelanjutan. Thailand dapat memanfaatkan pasar ini dan menjadi pemimpin di wilayah Asia-Pasifik dalam sektor ekonomi hijau.

Dengan mengadopsi model *Bio-Circular Green Economy*, APEC Thailand dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Keputusan ini mencerminkan komitmen Thailand dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi bangsa dan planet ini. Dengan alasan tersebut, peneliti kemudian meneliti usaha yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dan APEC sebagai suatu organisasi internasional dalam mencapai tujuan utama APEC, yaitu merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Ini diwujudkan melalui dorongan dan fasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di wilayah tersebut, serta peningkatan kerja sama dalam mengembangkan kapasitas ekonomi anggota, mitigasi perubahan iklim, pelestarian lingkungan, dan manajemen limbah untuk generasi yang akan datang, dengan fokus pada mewujudkan implementasi BCG sebagai strategi pembangunan berkelanjutan di Thailand. APEC, sebagai forum kerjasama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, memegang peran signifikan dalam mendorong negara-negara anggotanya, termasuk Thailand, untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Penelitian dapat menggali lebih dalam bagaimana APEC memfasilitasi

implementasi BCG di Thailand dan apakah ada tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya. Peneliti menggunakan konsep kerjasama internasional, teori pembangunan, teori struktural fungsional, teori liberalisme institusional, serta *Sustainable Development Goals (SDGs)* untuk membahas Implementasi BCG terhadap pembangunan berkelanjutan di Thailand. Maka dari persoalan di atas peneliti kemudian tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Perekonomian Thailand dan negara-negara APEC menghadapi tantangan yang signifikan dalam memenuhi permintaan energi yang terus meningkat sambil meminimalkan konsekuensi lingkungan yang negatif. Sulit untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan tanpa solusi kebijakan yang mengatasi masalah di sektor ini. Ekonomi APEC harus mendorong industri dan pekerjaan hijau baru, termasuk dengan memperkenalkan mekanisme berbasis pasar sebagai alat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana strategi konsep *Bio-Circular Green Economy (BCG)* menghadapi permintaan energi yang terus meningkat sambil meminimalkan dampak lingkungan yang negatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *Bio-Circular-Green Economy (BCG)* sebagai inisiatif pemerintah dan APEC Thailand dalam perwujudan APEC Putrajaya Vision 2040 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan Thailand yang nantinya dapat diadaptasi oleh negara-negara APEC.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Kegunaan ilmiah yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan serta wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Thailand dalam konsep *Bio-Circular Green Economy* (BCG) dan peran APEC sebagai sebuah organisasi internasional agar dapat dikaji lebih dalam oleh akademisi hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis Manfaat praktis yang oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk setiap aktor negara dan non-negara yang berkaitan dengan hubungan internasional dalam tingkatan nasional maupun internasional tentang kepentingan Thailand dalam implementasi *Bio-Circular Green Economy* (BCG) sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi topik pada penelitian ini, perlu adanya penguraian dari sistematik penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan proposal ini, terdiri dari lima bab yang mengandung banyak sub bab sebagai penjabarannya dan kemudian akan menghasilkan kesatuan sebagai wujud pembahasan masalah.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian PENDAHULUAN, penulis membahas tentang gambaran secara singkat mengenai kasus yang penulis bahas dalam karya ilmiah ini mengenai latar belakang masalah yang dibahas yaitu konsep *bio-circular green economy* (BCG) sebagai inisiatif pemerintah Thailand dalam kerangka apec berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bab ini juga berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian yang berisi kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian TINJAUAN PUSTAKA, penulis membahas tentang penelitian terdahulu yang harus dijelaskan apa saja perbedaan yang ada di dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Selain itu juga terdapat pembahasan berisikan mengenai penelitian terdahulu (literature review) yang berisi alasan penelitian terdahulu ini relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian penulis dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, kerangka teori berisi teori dan konsep, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian METODOLOGI PENELITIAN terdapat pembahasan mengenai pendekatan penelitian, teknik pengambilan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, aspek, dimensi, dan parameter.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bagian HASIL PEMBAHASAN, penulis membahas mengenai hasil dari penelitian ini dengan membahas konsep *Bio-Circular Green Economy (BCG)* sebagai inisiasi thailand dalam kerangka kerja APEC yang di dalam-nya berisikan pembahsan mengenai

BAB V: PENUTUP

Pada bagian KESIMPULAN ini yang juga bab terakhir berisikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Serta sebagai penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya yang diberikan penulis dalam penelitian di dalam penulisan ini.